

STRATEGIC ACCOUNTING
Peran Strategis Akuntan Indonesia
Dalam Penataan Ulang Sistem Keuangan Global

Dr. Jan Hoesada
Dosen Magister Akuntansi Universitas Indonesia
jan_hoesada@yahoo.com

ABSTRACT *Unification of the world's capital markets by IFRS convergence strategy was successful, because most of these countries to unite myself with global standards. IFRS GAAP 2009 is practically word for word translation and convergence will we do in the year 2012 to serve the public company which amounted to less than 1% of all business units in Indonesia. Almost 100% of business units in the country is marked private businesses UMKM, entrepreneurs are mostly Muslim, are now facilitated by ETAP Accounting Standards and Accounting Standards Sharia. Accounting is on economic development, not only the business of credit and debit financial statements, requires a new generation of counters with a way to think of State. Paper presented based on the idea of the various sources of literature references, the idea of recycling the original author and seminar papers as a member ekonotansi DSAK ideas and KSAP during the last 15 years, a variety of paper because the author is a lecturer and consultant management strategies in science.*

Key Word : *Strategic Accounting, IFRS, Sistem Keuangan Global*

Pendahuluan

Sejak IASB atau IFRS mendorong pasar modal dunia melalui penyatuan standar akuntansi berterima global, makin jelaslah posisi strategis dari teknologi akuntansi bagi peradaban manusia umumnya, bagi perekonomian khususnya. Praktis seluruh negara-negara terpenting di muka bumi telah mengkonvergensi diri atau sedang dalam proses konvergensi kepada IFRS.

Indonesia berkepentingan untuk pembangunan pasar modal, perekonomian berbasis UKM dan Syariah, karena itu Ikatan Akuntan Indonesia mendukung dengan penerbitan PSAK (besar) bagi pasar modal, PSAK ETAP bagi usaha tertutup terutama UKM, dan PSAK Syariah karena NKRI salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Disamping pada tataran standar akuntansi, peran akuntansi di luar standar bagi pembangunan NKRI amat besar. Makalah ini penuh pesan pembangunan berbasis akuntansi tersebut.

Gagasan tentang Peran Teknologi Akuntansi dalam Sistem Keuangan NKRI dan Pembangunan Perekonomian

Sebagai bagian Strategi Anti Krisis NKRI, diharapkan pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Syariah untuk membangun perekonomian berbasis Syariah bagi NKRI sebagai negara berpenduduk Muslim tiga besar di dunia pada umumnya, melakukan regulasi pemurnian transaksi Syariah pada setiap kegiatan perekonomian berbasis Al-Quran pada khususnya, lebih khusus lagi berupa penerapan perbankan Muamalah yang bertransaksi Mudharabah secara konsekuen.

Berbagai bukti empirik lintas zaman menyatakan bahwa perekonomian bertulang punggung UKM lebih kebal krisis global. Diharapkan pemerintah menggunakan Standar Akuntansi ETAP untuk membangun *Era-Baru-Perkreditan & Pendanaan Bukan Kredit- BagiUKM-Berbasis Niragun* pada umumnya, pada khususnya memberi basis berpijak bagi debitur-nasabah perbankan Syariah agar mampu melaporkan LK sebagai dasar Mudharabah.

Konvensi hendaknya menetapkan Visi baru dan cita-cita IAI tentang perekonomian Indonesia baru berbasis UKM, sebagai benteng pertahanan bangsa-anti-krisis-global, meningkatkan *income-percapita* & kesempatan kerja, meningkatkan kontribusi UKM terhadap PDB mencapai sekurang-kurangnya 75%-80% PDB dalam lima tahun ke depan.

Karena Skala Keekonomian Standar PSAK (besar) belum tercapai, maka untuk optimalisasi nilai ekonomis dari PSAK, diharapkan

- Pemerintah mendorong perusahaan tertutup masuk bursa dengan berbagai relaksasi peraturan dan insentif, sejalan dengan cetak-biru konvergensi PSAK kepada IFRS pada awal tahun 2012.
- BI melakukan pengawasan ketat penerapan Standar ETAP bagi BPR. BI menghimbau dunia perbankan pada umumnya untuk mempertahankan kinerja pelaporan LK Debitur perbankan yang telah sukses menggunakan PSAK dan mendapat opini audit WTP, agar tidak menggunakan Standar ETAP walaupun entitas debitur memenuhi segala syarat untuk menggunakan Standar ETAP.
- BI dan otoritas berwenang lain dalam pemerintahan (*governance*) LK menyikapi secara berhati-hati penggunaan hak untuk menetapkan secara khusus bagian dari industri perbankan (misalnya BPR, Debitur UKM) atau industri lain untuk menggunakan Standar ETAP, berdasar kemaslahatan makro & mikro ekonomi bangsa. Dunia akuntansi dan bisnis harus mempunyai visi bahwa Standar ETAP harus meningkatkan kesehatan praktik akuntansi di Indonesia secara keseluruhan, dan IAI harus mempertimbangkan kemungkinan pencabutan kembali Standar ETAP (melalui pemantuan ketat dampak penerapan standar ETAP kepada bangsa Indonesia dalam 3 tahun setelah tanggal berlaku efektif), apabila ternyata menyebabkan kemunduran GCG-NKRI umumnya, kemunduran dalam berakuntansi & ber Laporan Keuangan pada khususnya.
- Pemerintah menerbitkan PP yang mendorong penggunaan PSAK, PSAK ETAP, dan PSAK Syariah dalam penggunaan masing-masing secara tepat bagi bangsa Indonesia. Karena UUPT secara sengaja mengakomodasi pula pendirian PT berukuran UKM, diharapkan pemerintah juga bersedia menerbitkan PP pendukung UUPT yang menjelaskan lebih rinci, bahwa UUPT menggunakan basis akuntabilitas berdasar PSAK untuk PT Publik dan PSAK ETAP untuk PT privat umumnya, UKM khususnya.

Pada sektor akuntansi pemerintahan, diharapkan bahwa pemerintah memenuhi peraturan per-undang-undangan keuangan negara yang menetapkan bahwa LK Pemerintah disusun dengan basis AkruaI Paripurna pada tahun buku 2015.

Pemerintah diharapkan membuat pernyataan visi tentang Indonesia baru dengan GCG berbasis LK Pemerintah yang makin berkualitas, karena itu masa transisi kepada PP pengganti PP 24 harus ditetapkan mulai tahun 2010.

Pemerintah diharapkan mendorong implementasi PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Komite Standar Akuntansi pemerintah dan profesi akuntan diajak ikut sert mendukung program penerapan PP tersebut, misalnya ikut serta dalam pembuatan konsep sementara SK Bersama Permenkeu & Permendagri Pedoman Pelaksanaan SPIP-PP60-2008 dibidang pemerintahan.

Gagasan Tentang Laporan Keuangan

Rantai nilai utama LK adalah pembuatan bukti transaksi akuntansi, penyusun LK, auditor LK dan pengguna LK. Penyusun LK dan Auditor LK merupakan pemangku kepentingan yang harus dikembangkan secara khusus melalui PPL, pelatihan khusus, perangkat lunak akuntansi (seperti perangkat lunak akuntansi UKM, akuntansi PSAK 50 dan 55 dll).

Karena puncak kualitas LK adalah LK Auditan, maka SPAP tentang LK berbasis Standar ETAP dan Standar Syariah, serta pembaharuan Pedoman Audit LK UKM (versi Depkeu &IAI) tersesuai Standar ETAP merupakan kemestian yang segera.

Gagasan tentang Konvergensi PSAK terhadap IFRS

Bank Indonesia diharapkan mendorong IAI cq DPN dan DSAK untuk secara ketat dan habis-habisan (*all out*) mengawal penerapan PSAK 50 & 55 terhadap industri perbankan berlaku efektif 2010. Konvergensi paripurna PSAK terhadap IFRS yang direncanakan berlaku efektif 2012 harus dikawal ketat, agar jangan sampai gagal.

IAI cq DSAK hendaknya mengambil langkah lanjut setelah mencanangkan pada Bulan Juli 2009 di Malang bahwa PSAK ETAP khas Indonesia berlaku 2011,

diharapkan mendorong proyek Pedoman Akuntansi ETAP bagi **BPR Berkriteria UKM versi BI** selesai pada tahun 2010, Pelatihan Pedoman bagi BPR dimulai tahun 2010 menyambut tanggal berlaku efektif Standar ETAP tahun 2011.

PSAK Syariah diharapkan telah lengkap disusun pada tahun 2010, SPAP untuk audit LK berbasis Standar Syariah selesai disusun IAPI pada tahun 2010, pelatihan auditor LK berbasis Standar Syariah dilakukan IAPI untuk menyambut era baru LK UKM berbasis PSAK ETAP dan penerapan bagi hasil berbasis Mudarabah.

IAI harus membangun visi sebagai lembaga utama di dunia yang menerbitkan Standar Akuntansi Syariah tiga bahasa yang terbaik dengan target diakui dunia tahun 2012, dan NKRI menjadi negara rujukan bagi negara-negara lain yang bermaksud mendirikan Standar Akuntansi Syariah.

DPN IAI mengumumkan pendirian Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia (DSAKSI) dan Dewan Konsultatif DSAKSI pada tahun 2010 dengan pelibatan berbasis kepedulian berbagai pemangku kepentingan akan perkembangan ekonomi Syariah. IAI diharapkan merekrut anggota Dewan Konsultatif dari berbagai negara lain yang dinilai sebagai negara unggulan ekonomi Syariah, perbankan Syariah dan Akuntansi Syariah, misalnya Bahrain dan Malaysia, tanpa mengurangi independensi DSAKSI.

IAI membangun visi tentang Indonesia Baru berpenduduk mayoritas Muslim yang saleh dan modern, yang mampu mengaitkan kegiatan beragama dan kegiatan produktif berbisnis & berakuntansi secara Syariah, menghindari riba, KKN dan hukum Allah yang lain sesuai Al Quran.

Visi akuntansi 2012 tentang Indonesia Baru, bahwa NKRI adalah negara pertama yang menerapkan tiga standar akuntansi tersebut di atas secara amat baik.

Pelatihan Standar Syariah bagi kreditur & Standar UKM bagi debitur perbankan diharapkan dirancang berpasangan, agar bagi hasil berdasar Standar Muharabah dapat dilaksanakan secara lebih baik.

Gagasan tentang Kompetensi Akuntan Pemerintahan

Program peningkatan kompetensi pegawai pemerintahan digiatkan di bidang akuntansi pemerintahan, terutama pada Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dan Pemda. Pada tahun 2008-2009 Menteri Keuangan membuat program pelatihan akuntansi pemerintahan secara besar-besaran, pada 2010 hendaknya dilanjutkan oleh Menteri Keuangan baru. Perguruan tinggi akuntansi dan IAI diharapkan mendukung program pelatihan kompetensi melalui pembentukan Jurusan Akuntansi Pemerintahan.

Kompartemen Akuntan Sektor Publik harus membangun Sertifikasi Kompetensi Akuntan Pemerintah 2010-2014, ujian pertama dilakukan pada pertengahan tahun 2015, dan mendorong pembuatan Majalah Akuntansi Pemerintahan.

Menuju kepada GCG, *Clean & Strong Government*, profesi akuntan diharapkan mendorong upaya pemerintah dalam pembangunan SPIP Pemerintah Pusat dan menunjuk BPKP sebagai koordinator program pemerintah untuk implementasi SPIP-PP 60-2008, lalu mendorong gerakan yang sama untuk pembangunan Sistem Pengendalian Internal Pemda bersama Depdagri.

Pembuatan sistem akuntansi oleh Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri, sesuai PSAP akrual paripurna harus dimulai 1000 hari sebelum tahun 2015. KSAP membangun standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual paripurna selesai tahun 2010 dilanjutkan dengan berbagai Buletin Teknis Akrual Paripurna tahun 2011-2012.

Desain sistem komputer harus di uji coba sedini mungkin. Pedoman Akuntansi Perguruan Tinggi harus di susun oleh Depdiknas & IAI, agar GCG dunia pendidikan terbentuk lebih mantap.

Gagasan tentang Teknologi Auditing

Profesi auditing, IAI & IAPI, BPK, BPKP, APIP, Inspektorat Jenderal Departemen Pemerintahan diharapkan mendorong pelatihan bersama auditor dan auditee untuk penerapan PSAK 50 & 55 terhadap industri perbankan, audit berbasis Standar ETAP 2011 dan Standar Syariah. Konvergensi PSAK terhadap IFRS direncanakan berlaku efektif 2012 membutuhkan pelatihan auditor LK oleh IAPI, BPK, BPKP terkoordinasi oleh IAI.

IAPI bersama Departemen Keuangan diharapkan meninjau ulang Pedoman Audit LK UKM, untuk diselaraskan dengan Standar Akuntansi ETAP, pelatihan pedoman audit tahun 2010 menyambut era baru LK UKM berbasis Standar ETAP tahun 2011. Standar Profesi untuk audit LK berbasis Standar Syariah sebaiknya selesai disusun akhir 2010, pelatihan auditor LK berbasis Standar Syariah mulai tahun 2010/2011.

Gagasan tentang Regulasi Keuangan Sektor Publik

Profesi akuntan diharapkan mengusulkan bahkan mengingatkan agar pemekaran Pemerintah Daerah tidak dilakukan secara reaktif dan permisif, sehingga NKRI menghadapi risiko terpecah-pecah menjadi Pemda tidak mandiri, pemda terlampau kecil sehingga berskala-ekonomi tidak efektif-efisien, daya saing dan kemampuan sumberdaya yang makin lemah, biaya transaksi negara tidak efisien. Pemekaran harus berbasis cetak biru nasional jangka panjang berdasar konsep ekonomi kewilayahan.

Pasar modal sulit berkembang perlu di deregulasi Departemen Keuangan cq BAPEPAM agar emiten baru bermunculan. Dibutuhkan suatu deregulasi

mencakupi debirokratisasi pasar modal, menghapus peraturan yang terlampau banyak, membuka peluang emisi perdana perusahaan-pioneer-nirmasalalu, dan pasar modal bagi UKM. Pasar modal bagi koperasi harus dicegah, karena koperasi bukan kumpulan modal. Profesi akuntan harus mendorong pembuatan visi pasar modal dalam perekonomian Indonesia Baru dengan jumlah emiten pasar modal sekurang-kurangnya 300% dari posisi emiten aktif dewasa ini dalam 5 tahun terhitung sejak tahun konvergensi PSAK terhadap IFRS, untuk mencapai skala keekonomian pembuatan PSAK (*Standard's Economies of Scale*).

Program komputerisasi perpajakan oleh Ditjen Pajak dalam proses diharapkan berjalan lancar dan sukses, khususnya program komputerisasi WP terpadu dan melihat masalah ekonomis bagi pola kompensasi kewajiban dan kelebihan pembayaran pajak lintas jenis pajak per WP.

Departemen Keuangan diharapkan meningkatkan peran LK auditan dalam sistem perekonomian NKRI. Peran LK auditan dalam perpajakan perlu ditinjau kembali, dihidupkan kembali dan ditingkatkan, Departemen Keuangan diharapkan tidak gentar akan peristiwa malapraktik akibat perlakuan pajak istimewa bagi LK auditan beberapa tahun lalu sehingga dibatalkan kembali pemberlakuannya.

KSAP diharapkan bekerjasama dengan Departemen Keuangan cq Ditjen Pajak untuk membangun Buletin Teknis Akuntansi Pemerintah untuk Pajak umumnya, perlakuan akuntansi piutang-hutang pajak khususnya dalam era baru akuntansi pemerintah berbasis akrual paripurna.

DSAK harus bekerjasama dengan Departemen Keuangan cq Ditjen Pajak untuk resolusi berbagai isu konvergensi yang menimpa LK berlaku umum dan atau LK perpajakan.

IAMI diharapkan mampu menerbitkan berbagai Pedoman Aplikasi Akuntansi Manajemen (setara Standar Akuntansi Keuangan), melakukan diseminasi pedoman tersebut kepada entitas swasta dan pemerintahan -sedemikian rupa- agar

teknologi akuntansi manajemen dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing bangsa, diharapkan berdampak baik kemakmuran, pada PDB dan *income percapita* khususnya.NCSR diharapkan mengembangkan Sustainability Reporting dan Assurance Standar untuk menjaga kondisi lingkungan dan kondisi sosial NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur, Brian, W, (2009), *The Nature of Technology, What It Is and How It Evolves*, Free Press, New York.
- Kelly, Tom & Littman, Jonathan (2001), *The Art of Innovation*, Doubleday, Random House, Inc. New York, NY 10036.
- Pounder, Bruce, (2009), *Convergence Guidebook for Corporate Financial Reporting*. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
- Shane, Scott, (2009), *Technology Strategy for Managers and Entrepreneurs*, Pearson Education, Inc.
- Speser, Phyllis, L. (2006), *The Art & Science of Technology Transfer*, John Wiley & Sons, Inc.